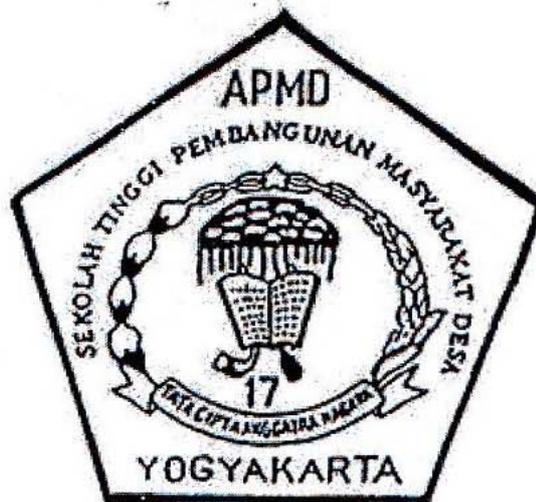


SKRIPSI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014

(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, DIY)



Disusun Oleh

HASAN B. MUKAT

08521926

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA



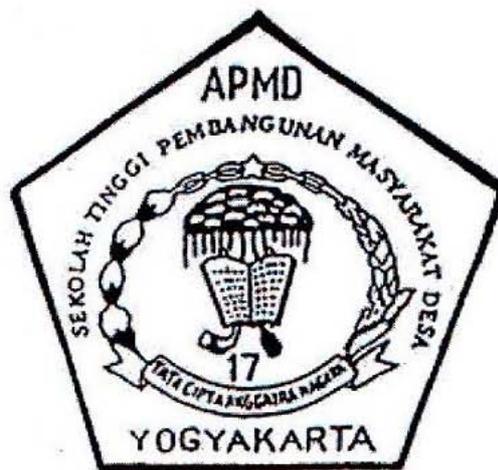
**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014**

(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, DIY)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan Jenjang (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh

HASAN B. MUKAT

08521926

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM
PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

Pada HARI : Senin
Tanggal : 18 April 2016
Pukul : 08:30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

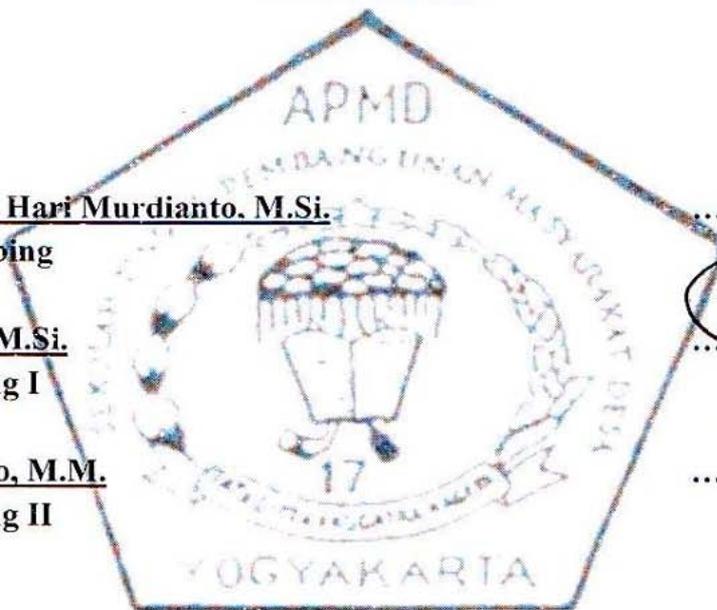
Nama:

Tandatangan

1. Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si.
Ketua/Pembimbing

2. Drs. Supardal, M.Si.
Penguji Samping I

3. Drs. Suharyanto, M.M.
Penguji Samping II



Widyo Hari Murdianto
.....
Supardal
.....
Suharyanto
.....

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
Gregorius Sahdan
Gregorius Sahdan, S.IP,M.A.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2016

SKRIPSI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014

(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, DIY)



Disusun Oleh

HASAN B. MUKAT

08521926

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014**

(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, DIY)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan Jenjang (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh

HASAN B. MUKAT

08521926

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM
PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

Pada HARI : Senin
Tanggal : 18 April 2016
Pukul : 08:30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama:

Tandatangan

1. Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si.

Ketua/Pembimbing

2. Drs. Supardal, M.Si.

Penguji Samping I

3. Drs. Suharyanto, M.M.

Penguji Samping II



Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP,M.A.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2016

HALAMAN MOTO

- ☞ SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN, MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN), KERJAKANLAH DENGAN SINGGUH-SINGGUH (URUSAN) YANG LAIN DAN HANYA KEPADA TUHANMU LAH HENDAKNYA KAMU BERHARAP. (Q.S: ALAM NASYORH: 68)
- ☞ APA BILA KEMAUAN ITU SINGGUH-SINGGUH, NISCAYA TAMPAKLAH JALAN. (USTADZ JA'FAR AMIR)
- ☞ KEBANGGAAN KITA YANG TERBESAR ADALAH BUKAN TIDAK PERNAH GAGAL, TETAPI BANGKIT KEMBALI SETIAP KALI KITA JATUH. (MUHAMMAD ALI)
- ☞ JANGAN PERNAH BERHENTI SEBELUM PERKARA ITU SELESAI. (PENULIS)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku yang tercinta dan tersayang, *Bapa* Burhan Hasan dan *Almahrumah Mama* Alwia Usman, yang sudah bersusah payah membesarkan, merawat, membina dan mendidik serta tak bosan-bosannya berdo'a untuk keberhasilan anak mu ini.
2. Kak Fatmawati Hasan yang tercinta dan tersayang, yang selama merawat dan menjaga diwaktu aku kecil, dan selalu mendukung dalam pendidikanku. *Etta Empa* terimakasih *jeaja*.
3. Mama Diyah yang tercinta dan tersayang, terimakasih atas dukungannya.
4. Adik-adik ku tercinta dan tersayang, Syaidah B. Mukat, Tajudin B. Mukat, Usman B. Mukat, Rahma Tiyah B. Mukat, Ibu Alwia Mahing dan Khoirul Illan B. Mukat, kalian lah pelengkap dalam kekuranganku.
5. Sahabat hati ku Dhita Selfhia Lingga Sari, terimakasih banyak atas kebersamannya selama 7 tahun ini. Engkauh lah penguat disaat aku jatuh.
6. Keluarga ku, Kak Jubaidah Hasan, Bibi Masitta Kaha, Bibi Muklisa Kaha, Bibi Nuraini Kaha, Bibi Nurma Kahah dan Bibi Nurhayati Kaha, Terimakasih atas dukungannya.
7. Opu Ramli Idris beserta istrinya kak Tri Winarni, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
8. Kawan Jul Kifli Tamrin, terimakasih atas pertemanan selama ini. (*cepat nyusul ya bro*)

9. Teman-Teman Teropong STPMD “APMD” Yogyakarta.
10. Teman-teman ustad di PAY AL-Idris dan adik-adik Santriwan dan Santriwati di PAY AL-Idris, terimakasih atas kebersamaannya.
11. Keluarga besar Yayasan “Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa” AL-IDRIS.
12. Teman-teman solor yang ada di jogja.
13. Teman-teman RUMAHLAMA Yogyakarta.
14. Almamaterku STPMD “APMD” Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang Strata (S-1). Judul dalam skripsi adalah TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014. (penelitian deskriptif kualitatif di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY)

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Habib Muhsin, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP,M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si. selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Drs. Supardal, M.Si. selaku Penguji samping I.
5. Bapak Drs. Suharyanto, MM. selaku Penguji samping II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis belajar.
7. Bapak Gubernur DIY yang telah memberikan ijin penelitian.
8. Bapeda Bantul yang telah memberikan ijin penelitian.
9. Bapak Eko Purwanta, S.IP selaku PJ Lurah/Desa Jagalan

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Namun demikian penulis yakin tidak semua langkah akan terlepas dari kesalahan dan kekurangan, justru disetiap sudut-sudut kegiatan terdapat deret-deret rintangan dan hambatan yang menghadang.

Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon maaf, serta tidak menutup kemungkinan adanya saran, pendapat dan kritik membangun dari semua pihak demi untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis, betapapun kecilnya karya ini, semoga dapat memberikan arti dan manfaat bagi semua yang membacanya.

Yogyakarta, 14 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
SINOPSIS	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. LANDASAN TEORI	4
E.1. Desa dan Pemerintahan Desa	4
1.1. Desa	4
1.2. Pemerintah Desa	11

E.2. <i>Good Governance</i>	19
E.3. <i>Good Governance</i> di Desa	26
F. Ruang Lingkup Penelitian	34
G. Metode Penelitian	35
G.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
G.2. Unit Analisis	36
G.3. Teknik Pengumpulan Data	37
G.3.a. Observasi	37
G.3.b. Wawancara	38
G.3.c. Dokumentasi	38
G.4. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data	49
BAB II. PROFIL DESA JAGALAN	42
A. Sejarah Desa	42
B. Gambar	43
C. Demografi Desa	44
D. Pemerintah Desa	53
E. Hasil Usulan Musrenbang Desa Jagalan Tahun 2015	71
F. Lembaga Kemasyarakatan Desa	71

BAB III. ANALISIS DATA	74
A. Deskripsi Informan	74
B. Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berdasarkan Undang- Undang No 6 Tahun 2014	77
1. Partisipasi Masyarakat	77
2. Akuntabilitas dan Transparansi	87
3. Responsivitas	92
 BAB IV. PENUTUP	 101
A. KESIMPULAN	101
B. SARAN	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Governance di Level Desa	28
Tabel 2. Data Desa Jagalan berdasarkan Jumlah Penduduk	44
Tabel 3. Data Desa Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4. Data Desa Berdasarkan Agama	45
Tabel 5. Data Desa Berdasarkan Kelompok Umur	46
Tabel 6. Data Dusun Desa Jagalan	47
Tabel 7. Data Desa Jagalan Berdasarkan Pendidikan	48
Tabel 8. Data Desa Berdasarkan Pekerjaan	49
Tabel 9. Data Pamong Desa Jagalan	55
Tabel 10. Data Pengurus Karang Taruna	72
Tabel 11. Data Pengurus Linmas	72
Tabel 12. Data Responden Berdasarkan Kedudukan	75
Tabel 13. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	75
Tabel 14. Data Responden Berdasarkan Kelompok Usia	76
Tabel 15. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	77

SINOPSIS

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Jagalan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik adalah yang *pertama*, dari segi dana, sebab di Desa Jagalan adalah Desa yang tidak memiliki PADes (Pendapatan Asli Desa). Sebab Desa Jagalan ini memiliki tanah khas Desa yang sangat terbatas. Permasalahan yang ke *dua*, faktor SDM (Sumber Daya Manusia). Pamong yang ada di Desa Jagalan kebanyakan merupakan Pamong produk lama yang rendah pendidikan dan minimnya pengalaman, hal ini yang menghambat kinerja kerja Pemerintah Desa. Desa Jagalan membutuhkan Pamong yang profesional dan mampu bekerja secara maksimal, mengingat Desa Jagalan adalah Desa yang tidak memiliki Pendapatan Asli Desa, karena itu dibutuhkan Pamong yang kreatif untuk mampu mewujudkan pendapatan asli Desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, unit analisis terbagi antara obyek dan subyek. Obyek penelitian adalah tata kelola pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul. Sedangkan untuk subjek penelitian diantaranya Kepala Desa Jagalan, Ketua BPD, Ketua Organisasi Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari data yang didapat, baik primer maupun skunder maka dapat dilihat dari Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jagalan selaku penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah mengupayakan segala kegiatan untuk mewujudkan *good governance di Desa*. hal ini yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa Jagalan mengutamakan nilai transparansi dan akuntabilitas didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir tahun ke Kabupaten, dan secara umum Laporan ke masyarakat melalui rapat BPD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU 6/2014) Tentang Desa, telah memberikan ruang bagi Pemerintah Desa dalam melakukan Pembangunan Desa yang tertuang dalam Pasal 78 (1), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan kewenangan yang dimilikinya.

Di sisi lain, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian desa adalah unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu Negara, mana mungkin bisa dikatakan bahwa dalam suatu Negara sangat sejahtera jika desanya belum sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat Desa adalah tolak ukur riil untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu Negara. Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *good governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka membangun *good governance* dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi dan keberadaanya mutlak terpenuhi.

Good governance memiliki pengertian dimana segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan dituntut untuk lebih efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Perananan pemerintah desa dalam melaksanakan *Good Governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

Di zaman sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik ditingkat desa (*good governance*) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: (1) Partisipasi, yang dimaksud dengan partisipasi merupakan suatu sifat mental atau emosional dalam diri manusia (masyarakat desa) yang muncul secara sadar untuk melibatkan diri (personal) dalam kegiatan dan urusan pemerintahan demi membangun kesadaran bersama untuk kemajuan desa; (2) Akuntabilitas dan Transparansi (*openness and transparency*) yang dimaksud dengan akuntabilitas merupakan sebuah bentuk tanggungjawab moral dari seorang pimpinan atau kelembagaan (pemerintah desa) kepada masyarakat dalam wujud laporan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan sehingga ada transparansi yang akan memicu terbangunnya kepercayaan (*trust*) dari warga masyarakat desa; (3) *Responsive*, yang dimaksud dengan *responsive* disini menjelaskan kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas serta mengembangkan program-program yang

sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu menunjukkan pada keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa peranan kelembagaan desa dalam pelaksanaan *good governance* sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan dalam pelaksanaannya. Pemerintahan yang *good governance* lebih dekat dengan rakyat berarti nilai-nilai demokratisasi harus dapat diwujudkan, karena mampu menggali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar. Oleh karena itu kebijakan yang di buat akan mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian yang penulis telah kemukakan diatas, penulis telah merumuskan masalah penelitian yang hendak diteliti dalam penelitian ini, yakni :

Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mendeskripsikan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY.

Daftar Pustaka

- A.W.H. Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokus Media
- Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* Jakarta : Ghalia Indonesia
- Dwipayana, Ari. dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Apm Press
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Lexy J.Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. PolGov UGM. Yogyakarta
- Shahriani dan Syakrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suhartono, Dkk. 2000. *Parlemen Desa, Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Taliziduhu, Ndraha, 1991. *Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Bumi Aksara. cetakan ke-3
- Taliziduhu, Ndraha. 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Toha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.

PDF

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

SKRIPSI

Payai, F Pims. 2015. *Primordialisme Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kampung (Studi Kasus di Kampung Mansaburi dan Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

ARTIKEL

Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam bulletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2009